

ABSTRAKSI

Penelitian “Peranan Camat Sebagai PPATS Dalam Penerbitan Akta Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu” bertujuan untuk: 1) Untuk mengetahui peran camat sebagai PPATS dalam penerbitan Akta Tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 (Studi di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu). 2) Untuk mengetahui proses dan persyaratan Administratif dalam Pendaftaran Tanah di Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu. 3) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Camat sebagai PPATS dalam penerbitan Akta Tanah dan bagaimana solusinya.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi metode pengumpulan data untuk memperoleh data yang akan dijadikan bahan skripsi melalui wawancara dengan Camat dan Staff Camat di Kantor Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, ataupun dengan observasi yang berupa pengamatan terlibat secara sistematis dalam memperoleh data. Setelahnya akan dilakukan analisis data yang diperoleh dari berbagai sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peran Camat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 dapat menjadi PPATS, jika di daerah tersebut masih minim adanya PPAT. 2) Proses dan Persyaratan Administratif Pendaftaran Tanah diawali dengan mengumpulkan persyaratan, membayar tagihan, pengecekan lokasi, pembuatan buku tanah, penerbitan sertifikat. 3) Ada 2 hambatan yang dihadapi oleh Camat, yaitu dari Faktor Intern dan Faktor Ekstern. Faktor Intern yaitu dari Birokrasi terlalu lama dan biayanya mahal, sedangkan Faktor Ekstern karena adanya keengganan masyarakat mengurus sertifikat dan adanya Calo.

Kata Kunci: Peran Camat, Penerbitan Akta Tanah

ABSTRACT

Research "The role of Camat as PPATS in the Issuance of Land Deed Based on Government Regulation Number 37 Year 1998 In Lohbener Sub-district of Indramayu Regency" aims to: 1) To know the role of sub-district head as PPATS in the issuance of Land Deed based on Government Regulation Number 37 Year 1998 (Study in Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu 2) To know the process and requirements Administrative in Land Registration in District Lohbener Indramayu District. 3) To know the constraints faced by the Camat as PPATS in the issuance of Deed Land and how the solution.

The research method in this research uses sociological juridical approach with the specification of data collection methods to obtain data that will be used as a thesis material through interviews with subdistrict heads and staff in Lohbener district office Indramayu District, or by observation in the form of observation involved systematically in obtaining data. After that will be analyzed data obtained from various sources.

The results of the research show that: 1) The role of the subdistrict head in Government Regulation No. 37 of 1998 can become PPATS, if in the area is still minimal PPAT. 2) Process and Administrative Requirements Land registration begins with collecting requirements, paying bills, checking the location, making land books, issuing certificates. 3) There are 2 obstacles faced by Camat, that is from Internal Factor and External Factor. Internal factors from the bureaucracy is too long and expensive, while the External Factor because of the reluctance of the community to take care of the certificate and the presence of brokers.

Keywords: Role of Sub-District Head, Issuance of Land Deed